

Akuntansi Sosial sebagai Alat Bantu Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dian Imanina Burhany

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang

ABSTRACT

Corporate social responsibility (CSR) is a central issue in business nowadays. Because of pressure of their stakeholder in one side and with understanding about the important of CSR for sustainability in the other side, most firms now not only care about economic aspect of their business but also care about other aspects that are social and environmental or many others else that are affected by firms operational. To disclose and report CSR, firms need social accounting. Social accounting can help firms in formulating and generating corporate social reporting so that stakeholder can read, evaluate and make important decisions about the firms.

Keywords: *Corporate social responsibility (CSR), social accounting, economic, social, environmental*

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR) sudah menjadi isu sentral dalam dunia bisnis saat ini. Perusahaan yang dulunya hanya menekankan aspek ekonomi yaitu mencari laba yang sebesar-besarnya saat ini mulai peduli dengan aspek lainnya yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Fraser (2005) menyatakan bahwa keterkaitan antara kegiatan bisnis dengan kegiatan sosial dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada abad ke-21 ini. Berry dan Rondinelli (1998) dalam Dunk (2002) mengatakannya sebagai sebuah revolusi industri baru (*the new industrial revolution*).

Pada awalnya kepedulian perusahaan akan CSR lebih merupakan respon atas tuntutan publik yang semakin lama semakin menyadari bahwa selain memberi manfaat kepada mereka melalui penyediaan

barang dan jasa untuk dikonsumsi,

perusahaan juga mendatangkan kerusakan dan kerugian melalui polusi air, tanah dan udara yang dihasilkan oleh proses produksi, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, efek samping dari produk yang dikonsumsi, tidak adanya jaminan kesejahteraan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai *stakeholder* utamanya tetapi juga kepada *stakeholder* lainnya. Jika secara tradisional *stakeholder* perusahaan lebih ditekankan pada *financial stakeholder* seperti pemegang saham dan kreditur maka saat ini *stakeholder* perusahaan semakin berkembang sampai meliputi pemasok, pelanggan, regulator, kelompok lingkungan hidup, masyarakat sekitar, media massa, dan lain-lain yang merupakan *non-financial stakeholder* (Shocker dan Sethi, 1974).

Lama kelamaan manajemen

perusahaanpun semakin menyadari bahwa perusahaan tidak bisa lagi hanya mengejar keuntungan tanpa mempedulikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perusahaan mulai mengimplementasikan CSR dalam berbagai bentuk seperti pembuatan produk yang lebih bersahabat dengan lingkungan (*environmentally friendly*), pemberian bantuan beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, penanaman pohon dan penghijauan, dan lain sebagainya yang intinya adalah merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan yang masih mempertahankan paradigma lama yang hanya mengejar keuntungan semata niscaya akan ditinggalkan oleh pelanggannya dan dalam jangka panjang justru akan menderita kerugian.

Hal ini didukung oleh salah satu teori terkenal yang mendasari perlunya perusahaan tidak hanya memikirkan profit semata yaitu pendekatan *triple bottom line* yang dikemukakan oleh Elkington (1998). Teori ini menyatakan bahwa agar dapat bertahan dalam jangka panjang (*sustainable*) suatu organisasi (perusahaan) harus aman secara **finansial**, harus mengeliminasi atau paling tidak meminimalkan dampak negatif terhadap **lingkungan**, dan harus bertindak sesuai dengan harapan **masyarakat**. Ketiga elemen *triple bottom line* tersebut dikenal juga dengan 3P yaitu Profit, Planet, People atau ekonomi (*economic*), lingkungan hidup (*environmental*), sosial (*social*).

Berbagai penelitian yang dilakukan sejak lama juga mendukung hal ini. Anderson dan Frankle (1980), Spicer (1978) dan Ingram (1978) menemukan hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan. Demikian juga dengan Eipstein dan Freedman (1994) yang menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan.

Semakin meningkatnya kesadaran perusahaan untuk mengimplementasikan CSR menimbulkan konsekuensi yang tidak kalah pentingnya yaitu pembuatan laporan yang dapat mengungkapkan (men *-disclose*) CSR tersebut. Dengan adanya laporan atau informasi tertulis maka para *stakeholder* dapat membaca dan menilai sejauh mana penerapan CSR oleh perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan yang berkaitan dengan perusahaan.

Akuntansi yang selama ini telah menjalankan peran tradisionalnya sebagai suatu sistem informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan (saja) dengan sendirinya dituntut untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan agar dapat mengakomodasi kebutuhan pelaporan CSR tersebut. Muncullah apa yang dinamakan sebagai akuntansi sosial yaitu suatu bidang akuntansi yang mengakomodasi kepentingan sosial dalam laporan yang dihasilkannya.

PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Definisi *corporate social responsibility* (CSR) dikemukakan oleh beberapa ahli maupun oleh lembaga. Frederick *et al.* (1992) menyatakan bahwa CSR berarti bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua tindakannya yang mempengaruhi masyarakat, komunitas dan lingkungan. Sementara Carroll (1979) mendefinisikan CSR sebagai: *the economic, legal, ethical and discretionary demands that society places on business.*

World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.*” Sedangkan The European Commission

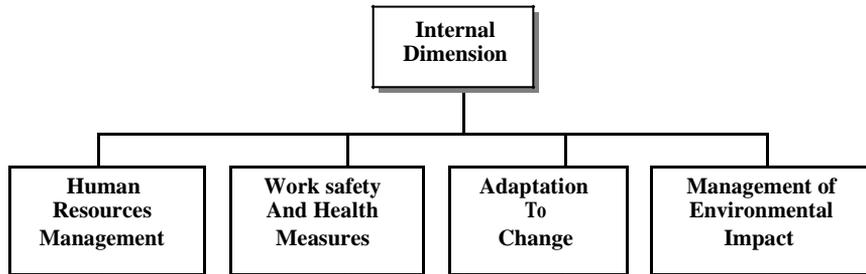
mendefinisikan CSR sebagai “*Being socially responsible means not only fulfilling legal expectations, but also going beyond compliance and investing more into human capital, the environment and relations with stakeholders.*”

Jadi intinya CSR adalah komitmen perusahaan untuk ikut peduli dan bertanggung jawab terhadap semua *stakeholder*-nya yang meliputi masyarakat, lingkungan hidup, pekerja, dan lain sebagainya.

sosial perusahaan. Sedangkan Gray et al. (1987) menyatakan bahwa *corporate social*

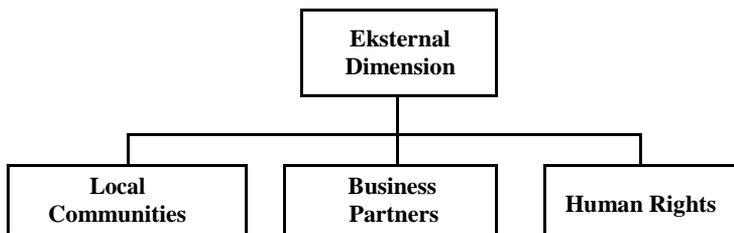
Commission of the European Communities dalam The Green Paper (2001) mengidentifikasi dua dimensi utama CSR yaitu dimensi internal yang berkaitan dengan praktik CSR dalam perusahaan dan dimensi eksternal yang berkaitan dengan praktik CSR yang menyentuh stakeholder eksternal.

Gambar 1. Dimensi Internal CS R



S umber: The Green Paper (2001)

Gambar 2. Dimensi Eksternal CSR



Sumber: The Green Paper (2001)

AKUNTANSI SOSIAL

Agar pelaksanaan CSR dapat diketahui oleh para *stakeholder* maka harus dilakukan pengungkapan atau pelaporan. Anderson dan Frankle (1980) menyatakan bahwa pengungkapan sosial (*social disclosure*) meliputi komunikasi dan pelaporan informasi mengenai aktivitas

reporting adalah “*the process of communicating the social and environmental effects of organizations’ economic actions to particular interest groups within society and to society at large*”

Pengungkapan atau pelaporan tersebut dihasilkan dengan bantuan akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sosial. Dalam

praktiknya, istilah akuntansi sosial atau

social accounting sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti *social responsibility accounting*, *social audit*, *societal accounting*, *socio-economic accounting*, *social reporting*, dan *social responsibility disclosure*.

Estes (1976) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai: “pengukuran dan pelaporan, internal maupun eksternal, informasi tentang pengaruh suatu entitas (perusahaan) dan aktivitas -aktivitasnya terhadap masyarakat.”

Sementara itu Parker, Ferris dan Otley (1989) mendefinisikannya sebagai: “pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi sosial organisasi yang didesain untuk mengevaluasi pengaruh sosial organisasi, mengukur efektivitas program sosial yang dilakukan, dan melaporkan semua pelaksanaan pertanggungjawaban sosialnya.”

Belkaoui (1993) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai: “proses pengurutan, pengukuran, dan pengungkapan pengaruh yang kuat dari pertukaran antar suatu perusahaan dan lingkungan sosialnya.” Sedangkan Cooper

et al. (2005), Gray (2001) Neu et al. (1998) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai penyiapan, penyajian dan pelaporan informasi mengenai faktor/kondisi sosial sebagai lawan dari faktor ekonomi.

Karena menggunakan kata “sosial”, ruang lingkup akuntansi sosial seolah-olah menjadi Sangat luas sehingga harus diperjelas apa yang dimaksud dengan sosial tersebut. Semua pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan sosial adalah segala hal

yang berkaitan dengan masyarakat umum namun dalam hubungannya dengan akuntansi sosial, cakupan sosial yang dimaksud meliputi lingkungan (*environment*), masyarakat (*community*), dan pekerja (*employee*) (Estes, 1976).

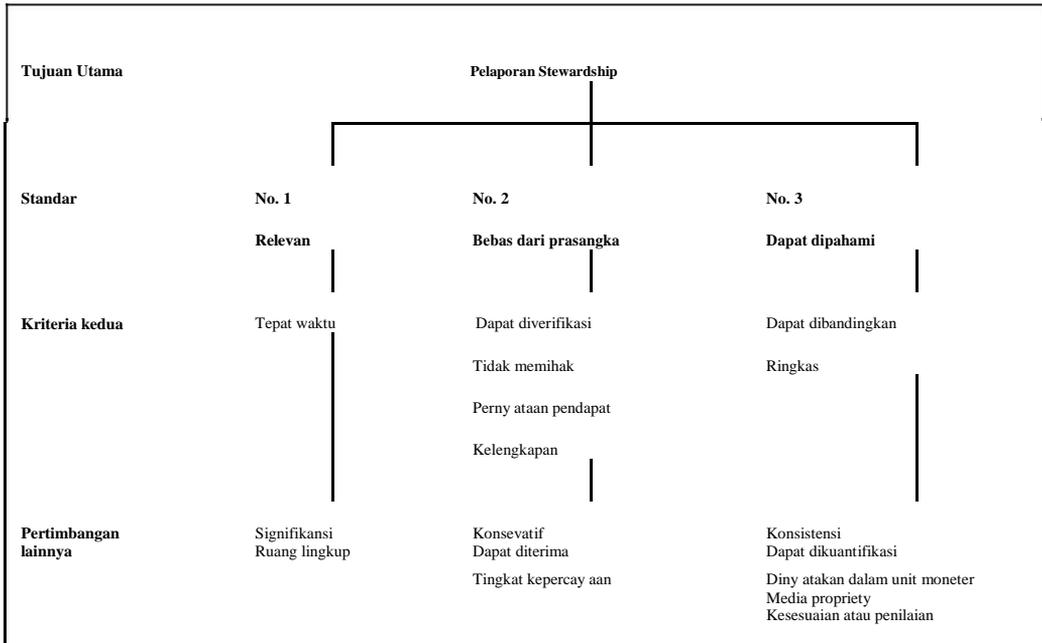
Karena ruanglingkup tersebut beberapa artikel dalam publikasi ilmiah atau organisasi seperti EPA (*The Environmental Protection Agency*) di Amerika Serikat membuat istilah yang lebih spesifik seperti *environmental accounting*, *green accounting*, atau *social and environmental accounting* (Bebbington, Gray dan Owen, 1999, Lehman, 1999).

BENTUK PELAPORAN AKUNTANSI SOSIAL

Tidak seperti halnya akuntansi keuangan yang telah memiliki standar yang mengatur bentuk dan isi pelaporan keuangan, belum ada standar yang

mengatur bentuk dan isi pelaporan sosial (untuk pelaporan eksternal).

Estes (1976) memaparkan standar pelaporan sosial perusahaan yang digunakan di Amerika namun standar ini hanya mencakup tujuan kualitatif laporan (yang harus diakui banyak diadopsi dari standar pelaporan keuangan) namun belum mengatur bentuk dan isi pelaporan. Standar pelaporan sosial tersebut digambarkan dan diuraikan di halaman berikut:



Gambar 3. Standar Pelaporan Akuntansi Sosial Perusahaan
Sumber: Estes (1976)

Standar No. 1

Sebagaimana halnya dalam pelaporan keuangan, **relevansi** merupakan standar yang pertama. Perusahaan sebaiknya tidak hanya melaporkan informasi sosial yang menarik melainkan harus memberikan informasi yang relevan.

Kriteria Kedua

Standar relevansi berkaitan dengan **ketepatan waktu**. Informasi yang diungkapkan akan menjadi tidak berarti jika dilaporkan pada waktu yang tidak tepat.

Pertimbangan Lainnya

Informasi yang disajikan harus dapat dievaluasi secara tepat. Tapi kesulitannya adalah menentukan kriteria mengenai mana yang **signifikan** dan mana yang tidak signifikan untuk pembaca laporan. Selain itu, **ruang lingkup** disajikan sebagai pelengkap laporan.

Standar No. 2

Pentingnya laporan sosial perusahaan **bebas dari prasangka** adalah untuk menghindari risiko distorsi atas laporan sosial yang dibuat. Jika informasi yang dilaporkan bebas dari prasangka, laporan tersebut menunjukkan nilai wajar dan dapat diandalkan.

Kriteria Kedua

Dapat diverifikasi (*verifiability*) pada kenyataannya masih sulit untuk diterapkan. **Tidak memihak** (*independent attestation*) harus disesuaikan dengan opini pemeriksaan pada laporan sosialnya. Sedangkan **kelengkapan** (*completeness*) merupakan hal yang cukup penting namun masih sulit dicapai saat ini.

Pertimbangan Lainnya

Unsur **konservatisme**, sebagaimana halnya dalam laporan keuangan, juga ada dalam laporan sosial. Selain itu, berbagai pertimbangan harus dibuat agar laporan

sosial dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

Standar No. 3

Laporan harus dapat dimengerti (*understandability*) karena jika tidak maka laporan menjadi tidak berguna.

Kriteria Kedua

Dapat dibandingkan dan adanya batas antar perusahaan merupakan langkah agar laporan dapat dievaluasi. Agar laporan tidak membingungkan pembaca, sebaiknya dibuat **ringkas**.

Pertimbangan lainnya

Sebagai salah satu model pelaporan, **konsistensi** yang berdasarkan alasan yang logis baru merupakan suatu harapan. **Dapat dikuantifikasi** (*quantifiability*) akan membantu pemahaman pemakai laporan sosial, walaupun tidak semua informasi dapat dinyatakan dalam satuan uang.

Dari berbagai literatur seperti Mathews (1994) dapat disimpulkan bahwa pelaporan akuntansi sosial dapat berbentuk naratif kualitatif, kuantitatif moneter, dan kuantitatif non-moneter. Sedangkan bentuk atau model pelaporan akuntansi sosial mencakup tiga pendekatan yaitu:

1. Pengungkapan dalam laporan keuangan

Isi laporan keuangan dapat diperluas dengan mengikutsertakan informasi tentang dampak sosial perusahaan, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

a. Pengungkapan pada *Letter to Shareholder*

Umumnya bersifat naratif tetapi dapat pula disajikan secara kuantitatif. Misalnya tentang isu lingkungan, sasaran perusahaan untuk aspek lingkungan ini, serta perbandingan kinerja perusahaan dengan sasaran ini.

b. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi aspek sosial perusahaan yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada umumnya tentang aktivitas yang berkaitan

dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat menimbulkan pengeluaran luar biasa di masa depan atau kewajiban kontinjensi. Misalnya perusahaan telah menjadi terdakwa di pengadilan sehubungan dengan kasus pencemaran lingkungan. Maka selain diperlukan pengungkapan mengenai perkiraan dana yang harus dikeluarkan sehubungan dengan masalah pengadilan ini, perusahaan juga harus mengungkapkan upaya perusahaan guna mengatasi pencemaran yang telah dilakukannya tersebut sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

c. Perkiraan Tambahan

Dampak sosial perusahaan dapat diungkapkan secara kuantitatif dalam satuan moneter dengan menggunakan perkiraan tambahan dalam laporan keuangannya. Metode ini konsisten dengan prinsip *full disclosure* dalam akuntansi yang mengimplikasikan perlunya modifikasi dan reklasifikasi perkiraan-perkiraan laporan keuangan bila terjadi perubahan kondisi yang menimbulkan kebutuhan informasi baru.

2. Format laporan terpisah

Format laporan terpisah sangat bervariasi bentuknya, mulai dari laporan yang hanya memberikan informasi kualitatif mengenai salah satu aspek tanggung jawab sosial perusahaan hingga laporan komprehensif mengenai berbagai aspek tanggung jawab sosial dalam unit moneter. Laporan ini biasanya disajikan dalam laporan tahunan atau *annual report* perusahaan. Parker, Ferris, dan Otley (1989) memberikan 4 contoh format laporan terpisah yang telah dikembangkan oleh Committee on Social Costs di Amerika selama tahun 1970-an dan 1980-an yaitu:

- a. Inventory approach
- b. Outlay cost approach
- c. Social program management report
- d. Cost-benefit approach

Gambar 4. Inventory Approach

Beta Ltd Social Responsibility Report Year Ended 30 June 19X8
<p>Employment</p> <p><i>Positive</i></p> <p>Expanded operations have provided 826 jobs in the past twelve months. Minorities employed now constitute 15 percent of the company workforce. Retirement counselling has commenced in the past year in all divisions.</p> <p><i>Negative</i></p> <p>Fluctuating demand has caused periodic layoffs in certain sections of production personnel. Poor industry relations still persist in division A.</p> <p>Community</p> <p><i>Positive</i></p> <p>Improvement of local parkland has been financed by the company in the past year. Two executives were loaned for short periods to advise on the development of a new community centre in division C's area.</p> <p style="padding-left: 40px;">Charitable contributions were made to the following institutions: X Y Z</p> <p><i>Negative</i></p> <p>Inner city neighborhood around division A in need of redevelopment. Program to subsidize vocational training for youth has had poor response.</p> <p>Product</p> <p><i>Positive</i></p> <p>Quality control procedures have been improved. Investment in expansion of customer complaint handling section has been doubled over the past year. Warranty conditions and coverage on two products have been expanded and improved.</p> <p><i>Negative</i></p> <p>Customer complaints about product servicing increased considerably over the past year. Certain aspects of division B's export product appear to be unsafe and must be reexamined.</p> <p>Environment</p> <p><i>Positive</i></p> <p>\$26,000 invested in new water pollution treatment plant for division A. Some old plant building in division A have been painted to improve visual effect in its inner city location. <i>Negative</i></p> <p>New air pollution control equipment installed in division B now fails to meet new State pollution control requirements.</p>

Gambar 5. Outlay Cost Approach

Alpha Ltd Social Responsibility Report Year Ended 30 June 19X8		
<i>Personnel outlay</i>	<i>19X7</i>	<i>19X8</i>
Superannuation contribution	\$ 540,276	\$
Long-term leave provided for	210,125	625
Worker compensation insurance premiums	17,515	,384
Accident prevention and medical service	26,726	235,468
Holiday pay	876,524	19,200
Christmas bonus	26,000	32,598
Discounts on company products	4,820	992,686
Donations for marriages and births	580	27,000
House rental subsidies	2,600	6,790
Company sports group subsidies	800	720
Plant safety competition	500	3,200
Canteen costs	12,800	700
Work clothes and protective equipment	2,600	400
Apprentice training	38,700	14,200
Supervisor training	8,700	4,300
		42,220
		7,600
	<u>\$</u>	
	<u>1,839,266</u>	
<i>Consumer outlays</i>		\$ 2,072,686
Meeting complaints	2,600	
Warranty corrective work	11,260	
Research and development	42,000	4,200
Consumer education	1,200	8,720
	<u>\$</u>	26,000
	<u>57,060</u>	1,800
<i>Environment-related outlays</i>		\$ 40,720
Air pollution control	4,720	
Noise pollution control	6,200	
Landscape and architectural improvement	500	10,560
	<u>\$</u>	2,320
	<u>1,420</u>	4,300
<i>Community service outlays</i>		\$ 17,180
Donations to charitable institutions	490	
Subscriptions to associations	1,200	
Subsidies to local sports	200	570
	<u>\$</u>	1,300
	<u>1,890</u>	450
Total outlay s	<u>\$</u>	\$ 2,320
	<u>1,839,636</u>	<u>\$ 2,072,686</u>

Gambar 6. Social Program Management Report

<u>Program Description: Health and safety in the workplace</u>		
Program objectives: To reduce incidence of employee suffering through accident and sickness.		
<i>Outlay Costs:</i>	<i>1985</i>	<i>1986</i>
Safety at work training	\$ 12,000	\$ 13,500
Installation of accident prevention equipment	21,000	18,200
Anti-smoking education	-	5,400
Safety officer salary and entitlements	35,000	37,000
Nursing staff and provisions	<u>97,000</u>	<u>112,000</u>
Total	<u>\$ 165,000</u>	<u>\$ 186,000</u>
<i>Results</i>		
<input type="checkbox"/> Man-hours lost through accidents reduced from 2,650 (1985) to 2,220 (1986). <input type="checkbox"/> Man-hours lost through illness reduced from 3,295 (1985) to 2,982 (1986). <input type="checkbox"/> Number of employees smoking has been reduced from 326 (45 percent) in 1985 to 245 (34 percent) in 1986. <input type="checkbox"/> Anti-smoking education has had a good initial impact but further reductions are yet hoped for. Illness is still a significant problem and new health education programs are planned. Accident have reduced appreciably although not in direct relationship to expenditure in that area. Alternative approaches to the problem are under consideration.		

Gambar 7. Cost-Benefit Approach

Social benefits		
<i>To employees</i>		
Increase in pay	\$ 14,260	
Increase in company contributions to superannuation, long service leave, holiday pay		
Employee training	9,820	
Job enrichment program	12,265	
Tertiary course subsidies	6,240	
	<u>4,200</u>	\$ 46,785
<i>To consumers</i>		
Price reductions on sales of products benefiting from increased productivity of new process		
Decrease in repair charges to consumers (compared with 19X7)	3,480	
	2,970	\$ 6,450
<i>To community</i>		
Wages paid for new jobs created		
Increased taxes paid by company		
Donations to charities	26,400	
Equipment and facilities hired for use by outside groups	5,760	
Training of handicapped workers	1,100	
	720	
	<u>4,695</u>	\$ 38,675
<i>To environment</i>		
Cost of landscape gardening around manufacturing plants		
Cost of painting old building exteriors		
Cost of installing air pollution control devices	13,240	
Total social benefits	9,870	
	<u>26,400</u>	\$ 49,510
		<u>\$ 141,420</u>
Social costs		
<i>To employees</i>		
Work-related injuries and illness		
Postponed cost of new safety devices		
Unpaid overtime worked	6,580	
	2,820	
	<u>8,526</u>	\$ 17,926
<i>To consumers</i>		
Reduced resale value on two products now rendered obsolete		
Cost of additional safety feature not added to one product (for this year's sales volume)	26,500	
	<u>9,280</u>	\$ 35,780
<i>To community</i>		
Increase in public facilities and services used		
Wages lost through lay offs		
	<u>2,485</u>	\$ 26,753
<i>To environment</i>		
Cost to local government of detoxifying local water supply	<u>24,268</u>	
Cost of non-renewable resources used		
Estimated cost of waste dumped		
Total social costs	2,526	
Net social benefits generated by company for year ended June 19X8	22,326	
	<u>3,397</u>	\$ 28,249
Comprising:		
Net Social Benefits to Employees		<u>\$ 108,708</u>
Net Social Costs to Consumers		<u>\$ 32,712</u>
Net Social Benefits to Community		
Net Social Benefits to Environment		
	\$ 28,859	
	(29,330)	
	11,922	
	<u>21,261</u>	\$ 32,712

3. Audit Sosial

Audit sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program dan aktivitas operasi perusahaan. Salah satu strategi untuk melakukan audit sosial adalah dengan mengembangkan aktivitas -aktivitas yang memiliki dampak sosial. Hal ini dapat

dilakukan dengan meminta manajer perusahaan untuk membuat daftar aktivitas - aktivitas beserta konsekuensinya dan setelah itu auditor sosial kemudian diminta untuk menilai dan mengukur dampak-dampak tersebut.

Bauer dan Feen dalam Parker, Ferris, dan Otley (1989) telah mengembangkan

proses audit sosial yang terdiri atas lempat langkah yaitu:

- a. Menilai keadaan di mana masing-masing program sosial dimulai
- b. Mengidentifikasi tujuan dari masing-masing program sosial
- c. Menetapkan dasar pemikiran/alasan yang mendukung program sosial
- d. Menggambarkan (jika mungkin secara kuantitatif) apa yang sudah dilakukan dibandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan alasan yang telah ditetapkan.

AKUNTANSI SOSIAL SEBAGAI ALAT BANTU PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Akuntansi sosial dapat melakukan pelaporan secara internal maupun secara eksternal. Pelaporan internal lebih difokuskan untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh manajemen demi perbaikan kondisi perusahaan dalam aspek sosialnya sedangkan pelaporan eksternal lebih merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR (Estes, 1976). Jika isi laporan internal dapat mencakup hal-hal mengenai: ketenagakerjaan, pengaruh perusahaan terhadap lingkungan dan pengawasannya, respon konsumen terhadap produk, dan lain-lain sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing perusahaan maka pelaporan eksternal dapat berisi informasi mengenai: pengendalian polusi (air, tanah dan udara), keamanan, dukungan terhadap pendidikan dan penelitian, ketenagakerjaan (pendidikan dan pelatihan), pengembangan kota, sumbangan-sumbangan, dan lain-lain.

Semakin komprehensif suatu laporan akuntansi sosial semakin bermanfaat bagi pemakai dan pembacanya. Hal ini sejalan dengan Estes (1976) yang menyatakan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh akuntansi sosial setidaknya memberikan sumbangan terhadap 3 tujuan perusahaan

yaitu:

1. Melalui pelaporan sosial, manajemen dapat mempelajari tentang organisasi dan dampaknya terhadap masyarakat.
2. Memperbaiki opini publik mengenai perusahaan.
3. Merupakan rasa tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, seberapa besar perilaku perusahaan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Tujuan yang ketiga tersebutlah yang sebenarnya sangat penting bagi perusahaan karena pada dasarnya perusahaan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya dan memiliki keinginan yang kuat untuk memperlihatkan rasa tanggung jawab sosialnya, baik itu akibat tekanan dari para *stak eholder* maupun karena kesadaran perusahaan sendiri akan manfaat dari CSR.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran akuntansi sosial sangat penting bagi perusahaan yang menerapkan CSR karena akuntansi sosial membantu mencatat dan melaporkan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. Belkaoui (1993) bahkan mengatakan bahwa akuntansi sosial sendiri pada dasarnya adalah suatu ekspresi tanggung jawab sosial suatu perusahaan.

Zairi dan Peters (2000) mengatakan bahwa kunci utama perusahaan untuk mengoptimalkan peran akuntansi sosial bagi masyarakat adalah dengan memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pertanggungjawaban sosial perusahaan, membuka dialog dengan para *stak eholder* dan membuat ukuran yang jelas mengenai pencapaian kelangsungan hidup lingkungan.

Sementara itu, Nelson (1998) dalam Zairi dan Peters (2002) berpendapat bahwa perusahaan yang ingin mewujudkan nilai tambah sosial (*societal value added*) harus memiliki karakteristik berikut ini:

1. Menyandarkan diri pada kepemimpinan dan visi/misi yang berdasarkan pada nilai.
2. Memiliki komitmen untuk melakukan pembelajaran, inovasi, pembentukan

- jaringan dan kemitraan global.
3. Membentuk jaringan atau mata rantai *stakeholder* yang saling menguntungkan.
 4. Menggunakan ukuran kinerja finansial dan non-finansial, yang didukung oleh auditing serta sistem pencatatan, verifikasi dan pelaporan.

Pada beberapa negara, pelaporan sosial masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun saat ini sudah banyak negara yang mewajibkan (*mandatory*). Indonesia termasuk negara yang sudah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR-nya yaitu melalui Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Pada Pasal 1 Ayat (3) UU ini disebutkan bahwa:

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya"

Sedangkan pada Pasal 66 ayat (2c) disebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya pada Pasal 74 ayat (1), (2), (3) dan (4) disebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun kewajiban ini hanya ditujukan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam namun UU ini telah menjadi suatu langkah awal yang positif bagi perusahaan agar tidak mengabaikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasionalnya dan memiliki kewajiban untuk melaporkannya.

Yang menjadi tantangan bagi praktisi akuntansi saat ini adalah sesegera mungkin merumuskan standar akuntansi sosial agar perusahaan memiliki pedoman dalam mencatat dan melaporkan aktivitas sosialnya terutama agar dapat dihasilkan laporan yang bersifat kuantitatif tanpa mengabaikan unsur kualitatifnya. Dengan demikian dapat dihasilkan laporan sosial yang lebih bermanfaat bagi pemakainya.

SIMPULAN

Saat ini perusahaan tidak bisa lagi mengabaikan pertanggung jawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Tekanan dari para *stakeholder* yang meliputi masyarakat, pemerintah sebagai regulator, aktivis lingkungan, pekerja, media massa dan sebagainya menuntut perusahaan agar merubah paradigma lama yang hanya mementingkan aspek ekonomi dalam menjalankan bisnis. Saat ini aspek sosial dan lingkungan juga harus diperhatikan. Sebagian perusahaan juga semakin menyadari bahwa penerapan CSR akan menguntungkan perusahaan sendiri dalam jangka panjang dan hal ini sudah didukung oleh berbagai penelitian.

Melaksanakan atau mengimplementasikan CSR adalah hal penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah

mengungkapkan dan melaporkan CSR agar para *stakeholder* dapat membaca, mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan kepentingan mereka dengan perusahaan. Akuntansi sosial dapat membantu pengungkapan dan pelaporan CSR tersebut karena akuntansi sosial merupakan suatu sistem pencatatan dan pelaporan aktivitas sosial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.C. and Frankle, A.W. 1980. Voluntary Social Reporting: An Iso - Beta Portfolio Analysis. *The Accounting Review*. Vol. LV, No. 3.
- Bebbington, J., Gray, R. and Owen, D. 1999. Seeing the wood for the trees. Taking the pulse of social and environmental accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol 12, No. 1. pp. 47-51.
- Belkaoui, A. 1993. *Accounting Theory*. The University Press Cambridge.
- Carroll, A.B. 1979. A three-dimensional model of corporate performance. *Academy of Management Review*, Vol. 4, No. 4, pp. 497-505.
- Cooper, C., Taylor, P., Smith, N., and Catchpole, L. 2005. A discussion of the political potential of social accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 16, pp. 951-974.
- Dunk, A.S.. 2002. Product quality, environmental accounting and quality performance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15, No. 5, pp. 719-732.
- Eipstein, J. and Freedman, M. 1994. Sosial disclosure and the individual investor. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 7, No. 4, pp. 94-109.
- Elkington, John. 1998. *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Stony Creek. CT:
- Estes, Ralph. 1976. *Corporate Social Accounting*. New York. John Wiley and Sons.
- EU Green Paper. 2001. *Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility*. Brussels, Commission of the European Communities, Retrieved on August 27, 2004 from www.btplc.com/Societyandenvironment/Reports/GreenpaperonCSR.pdf.
- Frederick, W.C. et al. 1992. *Business and Society*. McGraw-Hill International, New York, NY.
- Gray, R. 2001. Thirty years of social accounting, reporting and auditing: What (if anything) have we learnt?. *Business Ethics: A European Review*, 10(1), pp. 9-15.
- Gray, R., and Bebbington, Jan. 2001. *Accounting for the Environment*. 2nd ed. London: Sage Publications .
- Gray, R., Owen, D., and Maunders, K. 1987. *Corporate Social Reporting : Accounting and Accountability*, Prentice-Hall, London.
- Ingram, R. W. 1978. An investigation of the information content of (certain) social responsibility disclosures. *Journal of Accounting Research*. 16, pp. 270-285.
- Mathews, M.R. and Perera, M.H.B. 1995. *Accounting Theory and Development* , 3rd ed., Thomas Nelson Australia, Melbourne.
- Mathews, M.R. 1994. *Socially Responsible Accounting*. Chapman & Hall, London.
- Neu, D., Warsame, H., and Pedwell, K. 1998. Managing public impressions: Environmental disclosures in annual reports. *Accounting, Organizations and Society*. 23(3), pp. 265-282.
- Parker, Lee D., Ferris, Kenneth, R. and Otley, David T. 1989. *Accounting for The Human Factor*. Prentice Hall.

New Society Publishers.

Shocker, A. and Sethi, S. 1974. An approach to incorporating social preferences in developing corporate action strategies, in Sethi, S. (Ed.), *The Unstable Ground: Corporate Social Policy in a Dynamic Society*, Wiley, New York, NY.

Spicer, B. H. 1978. "Investors, corporate social performance and information disclosure: An empirical study". *The Accounting Review*. 53(1), pp.94-111.

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Zairi, M. and Peters, J. 2002. The impact of social responsibility on business performance. *Managerial Auditing Journal*. 17/4, pp. 174-178.

